



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 69 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Badan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Badan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Badan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Badan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Badan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Badan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Badan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Badan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 69**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, maka Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, maka setiap Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok kerja sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2023. Renja yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan Renja, yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja;
 - b. orientasi mengenai Renja;
 - c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Penyusunan rancangan awal Renja dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju.
- b. hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Renstra.

Penyempurnaan rancangan awal Renja dilakukan dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

3. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja. Rancangan Renja dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja;

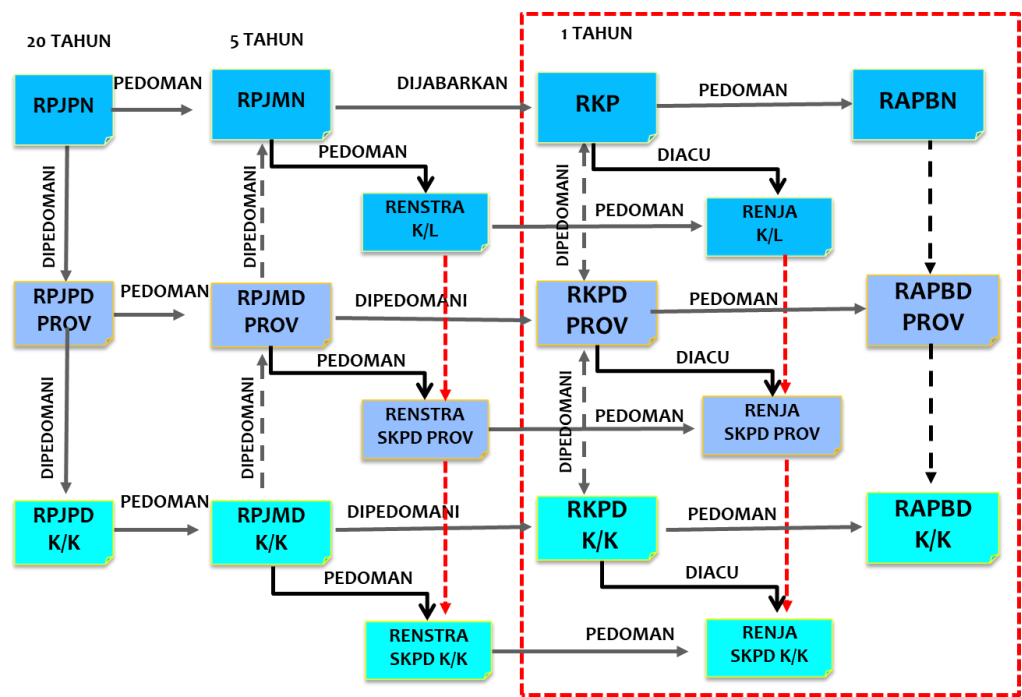
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja

Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan Perkada

tentang RKPD, yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan Renja

Rancangan akhir Renja disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada, setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.



Gambar 1.1

Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pusat Dan Daerah Dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Renja menterjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Badan sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD dan juga tujuan serta sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Badan.

Renja Bappeda Tahun 2023 disusun mengacu kepada RKPD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda Tahun 2019-2024, serta memperhatikan kepada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Renja yang telah ditetapkan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada landasan hukum peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang

- membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
43. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
44. Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 171);
45. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Renja adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda, Analisis Kinerja Pelayanan Badan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda, dan Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda Tahun 2023.

Bab V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023, dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Renja Bappeda Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 disusun berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 050/KEP.653-BAPPEDA/2020 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang diubah dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 050/KEP.1004-BAPPEDA/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 050/KEP.653-BAPPEDA/2020 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021. Keseluruhan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut. Dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021, menunjukkan pula gambaran capaian kinerja organisasi Bappeda dalam pelaksanaan tahun kedua Renstra Bappeda Tahun 2019-2024.

Upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2021 melaksanakan 4 program dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2021 mencapai 99,70%, dan rata-rata tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 53,67%, yang mencakup 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dengan target tahun 2021 sebesar 90% dengan dengan capaian terhadap target sebesar 100%. Program ini ditunjang sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, dengan pencapaian terhadap target indikator kinerja dari seluruh kegiatan tersebut mencapai 100%, yaitu :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator kinerja outcome pada program ini ada 2 (dua) yaitu persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan dengan target tahun 2021 sebesar 100% dan mencapai realisasi 100%, dan indikator persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan dengan target 100% dan mencapai realisasi 100%. Program ini ditunjang sebanyak 3 (tiga) kegiatan, dengan pencapaian terhadap target indikator kinerja dari seluruh kegiatan tersebut mencapai 100,00 %, yaitu :

- (1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- (2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- (3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja outcome pada program ini ada 3 (tiga) yaitu Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan target tahun 2021 sebesar 100% dan dapat mencapai realisasi 100%, Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan target sebesar 100% dan mencapai realisasi 100%, dan Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan target tahun 2021 sebesar 100% dan mencapai realisasi 100%. Program ini ditunjang sebanyak 3 kegiatan, dengan pencapaian terhadap target indikator kinerja dari seluruh kegiatan tersebut mencapai 100,00 %, yaitu :

- (1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

(2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

(3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Indikator kinerja outcome pada program ini yaitu Persentase rumusan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dengan target tahun 2021 sebesar 80% dan dapat mencapai realisasi 78,34%. Program ini ditunjang sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan pencapaian terhadap target indikator kinerja sebesar 100%.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 sampai dengan tahun berjalan 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan
Pencapaian Renstra Bappeda Sampai Dengan Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01				PERENCANAAN									
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90%		90%	90,00%	100,00%	90,00%	72,04%	72,04%
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rancangan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	100%		100 %	100%	100%	100,00%	50,00%	50,00%
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	10 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	5 dokumen	50%
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	4 Laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	100%		100 %	100 %	100%	100%	50,00%	50%
5	01	01	2.02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN.</i>	4 tahun		1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	2 tahun	50%
5	01	01	2.02	05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.</i>	15 Laporan		3 laporan	3 laporan	100%	4 laporan	7 laporan	46,67%
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan.	90%		90 %	90 %	100%	90%	45,00%	50%
5	01	01	2.03	02	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah tenaga keamanan yang disediakan.</i>	20 orang		4 orang	4 orang	100%	3 orang	7 orang	35%
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bldangnya.	51%		-	-	-	-	-	-
5	01	01	2.05	09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>	50 orang		-	-	-	-	-	-
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan.	90%		90 %	90 %	100%	90%	90,00%	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	20 macam		5 macam	5 macam	100%	5 macam	10	50%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	192 macam		48 macam	48 macam	100%	48 macam	96	50%
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai kebutuhan.	24 macam		6 macam	6 macam	100%	6 macam	12	50%
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar yang berlangganan dan pemasangan iklan di surat kabar.	20 jenis		5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	10	50%
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman.	22700 orang		3500 orang	3500 orang	100%	5800 orang	9300	40,97%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah dalam dan luar daerah.	48 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24	50%
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.	90%		90 %	90 %	100%	90%	50,00%	50,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan sesuai kebutuhan.	19 unit		8 unit	8 unit	100%	8 unit	16	84%
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah macam sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sesuai kebutuhan.	32 macam		8 macam	8 macam	100%	8 macam	16	50%
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan.	90%		90 %	90 %	100%	90%	5,00%	50,00%
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	28 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24	50%
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	12 jenis		3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	6	50%
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan dan alat-alat kebersihan yang disediakan sesuai kebutuhan.	8 paket		2 paket	2 paket	100%	2 paket	4	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan.	90		90 %	90 %	100%	90%	45%	50,00%
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya.	181 unit		41 unit	41 unit	100%	46 unit	87	48,07%
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan pemeliharaan rutin/berkala.	66 unit		55 unit	55 unit	100%	55 unit	55	83%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi.	4 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	2	50%
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan.	100%		100%	100%	100,00%	100%	50,00%	50,00%
						Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan.	100%		100 %	100 %	100%	100%	50,00%	50,00%
5	01	02	2.01	01	<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Perangkat Daerah oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.</i>	<i>16 Laporan</i>		<i>4 laporan</i>	<i>4 laporan</i>	100%	4 dokumen	<i>8 dokumen</i>	<i>50%</i>
5	01	02	2.01	02	<i>Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya</i>	<i>Jumlah laporan koordinasi keikutsertaan dalam Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.</i>	<i>4 Laporan</i>		<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	100%	1 laporan	<i>2 laporan</i>	<i>50%</i>
						<i>Jumlah laporan koordinasi keikutsertaan dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).</i>	<i>4 Laporan</i>		<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	100%	1 laporan	<i>2 laporan</i>	<i>50%</i>
5	01	02	2.01	04	<i>Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah.</i>	<i>300 Perangkat Daerah</i>		<i>75 Perangkat Daerah</i>	<i>75 Perangkat Daerah</i>	100%	75 Perangkat Daerah	150 Perangkat Daerah	<i>50%</i>
5	01	02	2.01	05	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.</i>	<i>400 orang</i>		<i>100 orang</i>	<i>100 orang</i>	100%	100 orang	200 orang	<i>50%</i>
						<i>Jumlah Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD Tingkat Kabupaten.</i>	<i>200 orang</i>		<i>100 orang</i>	<i>100 orang</i>	100%	-	100 orang	<i>50%</i>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sesuai ketentuan.	168 kecamatan		42 kecamatan	42 kecamatan	100%	42 kecamatan	84 kecamatan	50%
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumenJumlah dokumen Rancangan RKPD yang disusun sesuai ketentuan.	16 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 dokumen	50%
						Jumlah dokumen rancangan RPJMD yang disusun	6 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	-	3 dokumen	50%
						Jumlah dokumen Rancangan RPJMD yang ditetapkan sesuai ketentuan.	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	50%
						Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti sosialisasi RPJMD.	600 orang		300 orang	300 orang	100%	-	300 orang	50%
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai kebutuhan.	100%		100 %	100 %	100%	100%	50 %	50 %
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen updating Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disusun.	4 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	100		100 %	100 %	100%	100%	50,00%	50,00%
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SAKIP Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan.	25 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	12 dokumen	48%
						Jumlah Nota Pengantar dan Dokumen LKPJ Bupati Garut yang disusun sesuai ketentuan.	8 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	50%
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	12 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	6 dokumen	50%
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100%		100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100%		100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
						Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100%		100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100%		100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	212 Perangkat Daerah		53 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	100%	53 perangkat daerah	106 perangkat daerah	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	212 Perangkat Daerah		53 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	100%	53 perangkat daerah	106 perangkat daerah	50%
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	212 Perangkat Daerah		53 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	100%	53 perangkat daerah	106 perangkat daerah	50%
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	32 Perangkat Daerah		8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100%	8 perangkat daerah	16 perangkat daerah	50%
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	32 Perangkat Daerah		8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100%	8 perangkat daerah	16 perangkat daerah	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya.	32 Perangkat Daerah		8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100%	8 perangkat daerah	16 perangkat daerah	50%
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	32 Perangkat Daerah		8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100%	8 perangkat daerah	16 perangkat daerah	50%
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100%		100 %	100 %	100%	100%	50,00%	50,00%
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	28 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	7 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	28 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	7 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	50%
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	28 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	7 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	50%
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	28 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	7 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	50%
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100%		100 %	100 %	100%	100%	50,00%	50,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.	19 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	3 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	52,63%
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	19 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	3 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	52,63%
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	19 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	3 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	52,63%
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.	19 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	3 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	52,63%
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Perangkat Daerah		3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%	3 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	66,67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						<i>Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>								
5	01	03	2.03	06	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.</i>	<i>9 Perangkat Daerah</i>		<i>3 Perangkat Daerah</i>	<i>3 Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>3 Perangkat Daerah</i>	<i>6 Perangkat Daerah</i>	<i>66,67%</i>
5	01	03	2.03	07	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.</i>	<i>9 Perangkat Daerah</i>		<i>3 Perangkat Daerah</i>	<i>3 Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>3 Perangkat Daerah</i>	<i>6 Perangkat Daerah</i>	<i>66,67%</i>
5	01	03	2.03	08	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.</i>	<i>9 Perangkat Daerah</i>		<i>3 Perangkat Daerah</i>	<i>3 Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>3 Perangkat Daerah</i>	<i>6 Perangkat Daerah</i>	<i>66,67%</i>
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						97,93%			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rumusan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	85%		80%	78,34%	97,93%	85 %	50%	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan.	100%					100 %	-	-
5	05	02	2.02	05	<i>Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>	<i>Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Destinasi Wisata Unggulan yang disusun</i>	<i>1 dokumen</i>						-	-
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan.	100%					100 %	30%	30%
5	05	02	2.03	02	<i>Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Investasi Bahan Baku Komoditas Bambu yang disusun	3 dokumen					1 Dokumen	-	-
5	05	02	2.03	04	<i>Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	<i>Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun.</i>	<i>3 dokumen</i>					1 dokumen	1 dokumen	33,33%
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang implementatif.	85%		85 %	85 %	100%	85 %	50,00%	50,00%
5	05	02	2.04	04	<i>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	Jumlah Aplikasi SIM Surat dan Pengarsipan yang dikembangkan Jumlah Aplikasi Penanggulangan	3 aplikasi					2 Aplikasi	2 Aplikasi	66,67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Kemiskinan yang dibangun dan dikembangkan								
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan pelaksanaan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan dan seminar ilmiah yang diikuti.	4 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	50%
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Inovasi Daerah.	3 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	33,33%

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Bappeda Tahun 2021 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2021 sebesar 14.936.077.310,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 13.889.061.721.00 atau mencapai 92,99%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bappeda Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Realisasi Keuangan Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2021

Kode	Uraian Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5.	UNSUR PENUNJANG	14.936.639.883	13.889.061.721	92,99%
5.01.	PERENCANAAN	14.836.639.883	13.791.136.721	92,95%
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.774.077.283	8.912.679.637	91,19%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.249.400	64.869.600	91,05%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.250.000	51.065.000	92,43%
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.999.400	13.804.600	86,28%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.343.356.928	6.763.463.852	92,10%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.293.829.528	6.724.594.852	92,20%
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.527.400	38.869.000	78,48%
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	111.715.931	89.458.000	80,08%
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	111.715.931	89.458.000	80,08%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	758.057.124	637.837.614	84,14%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.099.300	13.275.000	82,46%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.171.024	198.206.300	95,67%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.784.000	62.157.950	66,28%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.932.800	15.125.000	94,93%
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	82.500.000	68.002.000	82,43%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.570.000	281.071.364	82,05%
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769.773.750	748.958.000	97,30%
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.950.000	211.100.000	98,67%
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	555.823.750	537.858.000	96,77%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.844.150	261.401.592	81,98%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.018.100	131.799.292	72,81%
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.960.000	22.740.000	75,90%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.866.050	106.862.300	99,07%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.080.000	346.690.979	86,44%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.750.000	7.621.500	26,51%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.160.000	82.732.479	73,76%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.170.000	256.337.000	98,53%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.607.800.300	2.471.929.750	94,79%

Kode	Uraian Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.274.717.100	2.165.078.100	95,18%
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	985.908.000	937.065.000	95,05%
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	66.456.100	66.005.500	99,32%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	71.927.000	71.298.600	99,13%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	374.941.000	330.869.000	88,25%
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	92.600.000	89.896.000	97,08%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	682.885.000	669.944.000	98,10%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	92.212.200	91.042.200	98,73%
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	92.212.200	91.042.200	98,73%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	240.871.000	215.809.450	89,60%
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	195.871.000	178.096.950	90,93%
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.000.000	37.712.500	83,81%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.454.762.300	2.406.527.334	98,04%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.077.622.800	1.074.062.834	99,67%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	222.785.000	221.946.034	99,62%
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	88.799.800	88.699.800	99,89%
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	78.235.000	77.760.000	99,39%
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	419.205.000	418.489.000	99,83%
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	45.760.000	45.760.000	100,00%
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	78.570.000	77.290.000	98,37%
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	144.268.000	144.118.000	99,90%
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	594.564.000	590.599.100	99,33%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	140.000.000	139.481.500	99,63%
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.000.000	74.290.300	99,05%
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	150.000.000	148.188.200	98,79%
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	229.564.000	228.639.100	99,60%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	782.575.500	741.865.400	94,80%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144.954.000	144.784.000	99,88%

Kode	Uraian Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	37.185.000	37.184.900	100,00%
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	134.555.000	134.545.000	99,99%
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	465.881.500	425.351.500	91,30%
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.000.000	97.925.000	97,93%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100.000.000	97.925.000	97,93%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.000.000	97.925.000	97,93%
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.000.000	97.925.000	97,93%

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan *good governance*, organisasi Badan dituntut untuk semakin profesional dalam bidang tugasnya. Selama pelaksanaan otonomi daerah, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Garut mengalami peningkatan. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2017-2021 antara lain sebagai berikut.

- (1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019–2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022;
- (2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Garut; Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan;
- (3) Tersedianya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah;
- (4) Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan;
- (5) Tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
- (6) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- (7) Terselenggaranya bimbingan teknis/ workshop perencanaan pembangunan daerah; dan

- (8) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Terselenggaranya proses penyusunan perencanaan pembangunan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dengan partisipasi para pemangku kepentingan yang semakin meningkat;
2. Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta ditunjang dengan data dan informasi yang akurat;
3. Terselenggaranya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal;
4. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan efektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
5. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
6. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perencana pembangunan daerah;
7. Meningkatnya sarana dan prasarana perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah.	-	-	90%	90%	90%	95%	90%	90%	90%	95%	
4.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif.	-	-	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
5.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
9.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	-	-	84%	86%	88%	88%	83%	86%	88%	88%	
12.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan			80%	85%	90%	95%	6,82%	85%	90%	95%	
13.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			75%	80%	85%	90%	66,67%	80%	85%	90%	
	Penerapan SIDA:											
14.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah			50%	60%	70%	80%	27,27%	60%	70%	80%	
15.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah			75%	80%	85%	90%	78,95%	80%	85%	90%	

Sumber

:

Bappeda

Kabupaten

Garut,

Tahun

2021

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

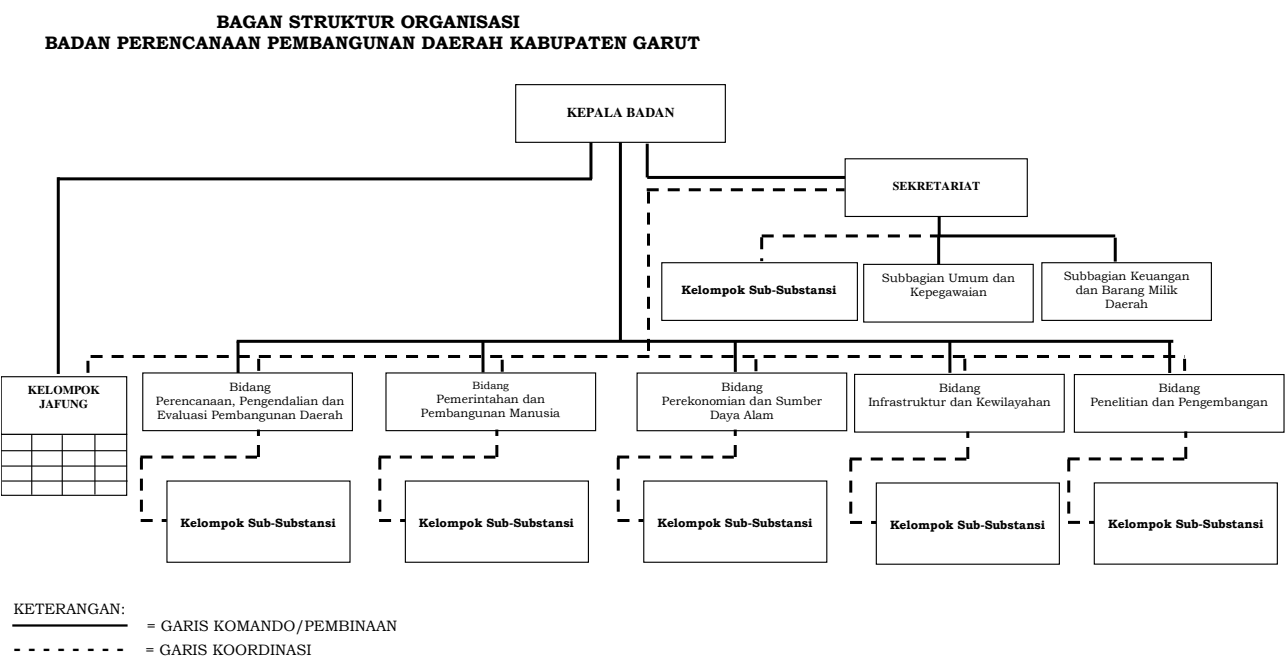
Susunan dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Susunan Organisasi Badan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 5 (lima) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Sub Koordinator.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Sub Koordinator.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan Sub Koordinator.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan Sub Koordinator.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan Sub Koordinator.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut**

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 269 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan peran Badan sebagai sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Perencanaan

- a. Sinkronisasi data perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal. Tingkat ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data dari berbagai sumber, serta pengoptimalan hasil kajian penelitian dan pengembangan.
- b. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan belum optimal. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, aspirasi serta tuntutan masyarakat semakin beragam sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian maupun bentuk pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- c. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih kurang.
- d. Struktur organisasi Bappeda sudah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, namun masih perlu dioptimalkan dengan penguatan sistem dan tata kelola mekanisme kerja. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi umum, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum sinergi dan selarasnya hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya;
- c. Sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan masih terbatas.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. mengkoordinasikan para pelaku pembangunan;
2. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
3. melakukan berbagai upaya untuk:
 - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - c. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan pokok tersebut, maka diidentifikasi beberapa kondisi yang diinginkan sebagai isu strategis dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien yang dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan, antara lain adalah:

1. Perencanaan
 - a. Penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, dengan ruang lingkup integrasi sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, kemudahan implementasi tahap perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
 - b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia perencana sesuai kebutuhan ideal;

- e. Implementasi penyelarasan perencanaan antara daerah, provinsi dan pusat serta antar sektor tingkat pemerintahan.

2. Penelitian dan pengembangan

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama serta kualitas perencanaan dan evaluasi program penelitian dan pengembangan;
- c. Peningkatan kebijakan inovasi daerah, fasilitasi inovasi daerah, dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDa);
- d. Penguatan basis data dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Awal RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja.

Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan alasan untuk mengidentifikasi apakah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada Renja telah sesuai atau tidak sesuai dengan arahan Rancangan Awal RKPD.

Proses perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Pada hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan baru yaitu:
 - 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
2. Pada hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan 3 (tiga) sub kegiatan baru yaitu:
 - 1) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan;
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial;
 - 3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.

3. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp.18.541.808.695,00 sedangkan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebesar Rp.19.194.510.841,00 maka dapat disimpulkan terdapat penambahan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.652.702.146,00.
4. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	01				PERENCANAAN				17.491.808.695	5	01				PERENCANAAN				17.694.510.841	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	11.588.058.395	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	11.481.126.841	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 %	84.305.000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 %	135.209.700	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.155.000	5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	54.161.000	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.920.000	5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.188.000	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.920.000	5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	6.188.000	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.920.000	5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.188.000	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen	4.920.000	5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.188.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							DPA-SKPD													
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	14.690.000	5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.400.700	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	24.780.000	5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	35.896.000	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan	100 %	8.195.036.682	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan	100 %	8.217.945.782	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.137.173.182	5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.137.173.182	
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.598.000	5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.022.200	
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.598.000	5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.022.200	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	10.097.500	5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	23.070.000	
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.218.000	5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.903.200	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	35.950.000	5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	39.838.200	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.402.000	5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.916.800	
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	90 %	157.097.908	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	90 %	157.394.809	
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	149.267.908	5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	149.267.809	
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.420.000	5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.619.500	
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.410.000	5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.507.500	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	50 %	269.884.105	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	50 %	282.769.350	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	99.330.105	5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	113.236.150	
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0											
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	39.295.000	5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	39.662.000	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	92.560.000	5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	92.611.000	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	38.699.000	5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	37.260.200	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan	100 %	997.190.750	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan	100 %	1.152.625.600	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.047.600	5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.755.400	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	200.263.500	5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	201.228.600	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	190.484.300	5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	191.218.100	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	58.334.000	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	59.005.600	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17.350.800	5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17.350.800	
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	119.972.000	5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	117.366.000	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	260.120.000	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.108.000	
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	37.880.550	5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	37.985.100	
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	97.738.000	5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	112.608.000	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	90 %	975.633.800	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	90 %	787.439.150	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	428.760.000	5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	412.960.000	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	129.172.200	5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	158.253.550	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	417.701.600	5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	216.225.600	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90 %	325.117.650	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90 %	320.748.850	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	189.981.600	5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	189.981.600	
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.940.000	5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.560.000	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	109.196.050	5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	109.207.250	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan	90 %	583.792.500	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan	90 %	426.993.600	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.725.000	5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.735.000	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	47.075.000	5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	47.055.000	
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0											
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0											

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	494.992.500	5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	338.203.600	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0											
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	2.526.839.300	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	2.807.576.300	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan	100 %	2.105.809.500	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan	100 %	2.286.546.500	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	989.441.000	5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1.170.178.000	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	190.825.000	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	190.825.000	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	40.540.000	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	40.540.000	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	91.640.000	5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	91.640.000	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	201.957.500	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	201.957.500	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	42 Usulan	125.926.000	5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	42 Usulan	125.926.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	465.480.000	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	465.480.000	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai kebutuhan	100 %	90.689.800	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai kebutuhan	100 %	190.689.800	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen	0											
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0 Orang	0	5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	100.000.000	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	90.689.800	5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	90.689.800	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	330.340.000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	330.340.000	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	287.750.000	5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	287.750.000	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	42.590.000	5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	42.590.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	3.376.911.000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	3.405.807.700	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	100 %	935.601.000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	100 %	1.085.082.400	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	0	5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	74.999.900	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53 Laporan	152.942.000	5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	75.000.000	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0	5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	75.000.000	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	390.797.000	5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	243.331.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	01	03	2.01	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	138.406.000	5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	62.910.000	
5	01	03	2.01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	0	5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	103.841.500	
5	01	03	2.01	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	253.456.000	5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	300.000.000	
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	1.028.770.000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	1.028.770.000	
5	01	03	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	453.570.000	5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	453.570.000	
5	01	03	2.02	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	146.000.000	5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	146.000.000	
5	01	03	2.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	150.000.000	5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	150.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 Laporan	279.200.000	5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 Laporan	279.200.000	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	1.412.540.000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	1.291.955.300	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	129.405.000	5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	129.405.000	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	50.415.000	5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	50.415.000	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	226.716.800	5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	226.716.800	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	394.440.600	5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	273.855.900	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	127.158.900	5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	127.158.900	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	50.414.900	5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	50.414.900	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	137.597.900	5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	137.597.900	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	296.390.900	5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	296.390.900	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.050.000.000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.500.000.000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	85 %	1.050.000.000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	85 %	1.500.000.000	
										5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan	100 %	200.000.000	
										5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	200.000.000	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan	85 %	100.000.000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan	85 %	550.000.000	
										5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	300.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100.000.000	5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	250.000.000	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan	85 %	500.000.000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan	85 %	300.000.000	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	100.000.000	5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	100.000.000	
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	100.000.000											
5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	100.000.000											
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	100.000.000											
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	100.000.000	5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	200.000.000	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang implementatif	85 %	450.000.000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang implementatif	85 %	450.000.000	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	250.000.000	5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	250.000.000	
										5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	100.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	100.000.000	5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	100.000.000	
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	100.000.000											
TOTAL									18.541.808.695										19.194.510.841	

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Badan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk perencanaan tahun 2023 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Bappeda melalui SIPD Kemendagri.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	[NIHIL]				

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut, Tahun 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan bidang perencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan, maka sebagai kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah turut memperhatikan pula arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai

wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pelaksanaan RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

RKP tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan nasional yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan merupakan penerjemahan dari visi-misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih tahun 2020-2024.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema pembangunan RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, berbagai masukan hasil konsultasi publik serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian serta arahan Presiden RI . Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata. Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

- (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Tema RKP Tahun 2023 secara spesifik dijabarkan kedalam 8 (delapan) arah kebijakan meliputi:

- (1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
- (2) Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
- (3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
- (4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
- (5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- (6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);

- (7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar;
- (8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sesuai tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Garut berfokus pada pelaksanaan Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik khususnya pada Program Prioritas 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah khususnya pada Indikator 4.5 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke Atas SAKIP.

Sementara itu, guna mewujudkan penyelarasan perencanaan daerah dengan kebijakan di tingkat provinsi Jawa Barat, maka dilakukan pula telaahan atas tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, dengan visi pembangunan jangka menengah yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**, yang diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- 1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- 2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- 3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;

- 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri

untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 merupakan tahap pembangunan kelima dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sesuai dengan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, tema atau fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 adalah **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**. Tema ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024 adalah:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi. Perumusan Tujuan dilakukan dengan memperhatikan pernyataan Visi dan Misi Perangkat Daerah dan pernyataan Tujuan pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Garut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Bappeda Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:
 - a. Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja;
 - b. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
- 2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan, dengan indikator:
 - a. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Bappeda Tahun 2023 :

Tabel 3.1.
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Tujuan	Indikator	Target Tahun 2023
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan.	24,30 poin
	Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	95%
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	85%

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka

menengah Bappeda Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Bappeda Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:
 - a. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD;
 - b. Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD;
 - c. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah
2. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah, dengan indikator:
 - a. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif.

Berikut disajikan Rencana Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2023 :

Tabel 3.2.

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023
1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD.	100%
	Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD.	100%
	Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah.	95%
2. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif.	85%

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam menyusun rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Garut Tahun 2019-2024, yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah:

"Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, maka perumusan tema pembangunan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan seiring kondisi Kabupaten Garut yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat

pandemi Covid-19, dan berdasarkan RKPD Tahun 2023, maka tema pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023, yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah Serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada i) peningkatan pelayanan publik; ii) pemerataan pembangunan dan daya saing daerah; iii) penguatan demokrasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 serta iv) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, pemulihan industri, perdagangan, pariwisata, investasi, serta penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut untuk Tahun 2023 terdiri dari:

1. Pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2023
2. Percepatan pemulihan ekonomi
3. Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan
4. Lanjutan penuntasan prioritas pembangunan daerah

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024, maka penyusunan Renja Tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2023 yang difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 serta visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Bappeda Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan, dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Misi kedua tersebut menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Strategi dan kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selanjutnya

secara operasional diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Bappeda Tahun 2023 merupakan pelaksanaan penjabaran operasional tahun keempat dari Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan Renja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuatannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuatannya Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 memuat sebanyak 4 program, sebanyak 18 kegiatan dan sebanyak 78 sub kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan, sub kegiatan yang direncanakan pada Renja Bappeda Tahun 2023 adalah terfokus pada lokasi administratif pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Garut yaitu di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

Total rencana kebutuhan dana/pagu indikatif belanja untuk mendukung seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 19.194.510.841,00 yang seluruhnya bersumber dari Dana Transfer Umum pada APBD Kabupaten Garut.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Sebagaimana telah diuraikan pada Sub Bab 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, hasil analisis kebutuhan Renja Bappeda Tahun 2023 dibandingkan dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa untuk rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023 mengalami penambahan sebanyak 1 (satu) kegiatan baru dan 3 (tiga) sub kegiatan baru, dan pagu indikatif mengalami penambahan sebesar Rp.652.702.146,00.

d. Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Garut untuk Tahun Rencana 2023 dan prakiraan maju untuk Tahun 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01				PERENCANAAN				17.694.510.841				17.139.070.797
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan		90 %	11.481.126.841			90 %	11.429.433.547
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan		100 %	135.209.700			100 %	79.357.900
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Dokumen	54.161.000	PENDAPATAN TRANSFER		2 Dokumen	25.000.000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Dokumen	6.188.000	PENDAPATAN TRANSFER		2 Dokumen	5.000.000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Dokumen	6.188.000	PENDAPATAN TRANSFER		2 Dokumen	5.000.000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Dokumen	6.188.000	PENDAPATAN TRANSFER		2 Dokumen	5.000.000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Dokumen	6.188.000	PENDAPATAN TRANSFER		2 Dokumen	5.000.000
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Laporan	20.400.700	PENDAPATAN TRANSFER		2 Laporan	14.357.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	5 Laporan	35.896.000	PENDAPATAN TRANSFER		5 Laporan	20.000.000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan		100 %	8.217.945.782			100 %	8.244.520.349
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	60 Orang/bulan	8.137.173.182	PENDAPATAN TRANSFER		60 Orang/bulan	8.191.290.349
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	5.022.200	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	3.600.000
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	5.022.200	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	3.360.000
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	6 Laporan	23.070.000	PENDAPATAN TRANSFER		6 Laporan	8.370.000
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	3.903.200	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	2.000.000
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	30 Laporan	39.838.200	PENDAPATAN TRANSFER		30 Laporan	33.900.000
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	3.916.800	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	2.000.000
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan		90 %	157.394.809			90 %	156.607.410
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12 Dokumen	149.267.809	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	149.267.910

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Laporan	4.619.500	PENDAPATAN TRANSFER		2 Laporan	4.379.500
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Laporan	3.507.500	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	2.960.000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.		50 %	282.769.350			50 %	238.625.105
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 Paket	113.236.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Paket	99.330.105
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	39.662.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	39.295.000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	60 Orang	92.611.000	PENDAPATAN TRANSFER		60 Orang	100.000.000
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	37.260.200	PENDAPATAN TRANSFER		60 Orang	0
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan		100 %	1.152.625.600			100 %	890.168.733
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12 Paket	15.755.400	PENDAPATAN TRANSFER		12 Paket	25.542.300
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12 bulan	201.228.600	PENDAPATAN TRANSFER		12 bulan	216.828.333
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Paket	191.218.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	190.484.300
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12 bulan	59.005.600	PENDAPATAN TRANSFER		12 bulan	67.733.000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	17.350.800	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	10.350.800
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12 Laporan	117.366.000	PENDAPATAN TRANSFER		12 Laporan	124.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12 Laporan	400.108.000	PENDAPATAN TRANSFER		12 Laporan	224.730.000
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	37.985.100	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	10.000.000
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	112.608.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	20.000.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan		90 %	787.439.150			90 %	1.039.512.650
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3 unit	412.960.000	PENDAPATAN TRANSFER		3 unit	552.000.000
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Unit	158.253.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	129.172.200
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3 Unit	216.225.600	PENDAPATAN TRANSFER		3 Unit	358.340.450
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		90 %	320.748.850			90 %	346.481.400
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12 Laporan	189.981.600	PENDAPATAN TRANSFER		12 Laporan	175.000.000
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12 Laporan	21.560.000	PENDAPATAN TRANSFER		12 Laporan	26.680.000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12 Laporan	109.207.250	PENDAPATAN TRANSFER		12 Laporan	144.801.400
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan		90 %	426.993.600			90 %	434.160.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Unit	41.735.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Unit	20.000.000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	18 Unit	47.055.000	PENDAPATAN TRANSFER		18 Unit	114.160.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3 unit	338.203.600	PENDAPATAN TRANSFER		3 unit	300.000.000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan		100 %	2.807.576.300			100 %	2.718.418.500
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan		100 %	2.286.546.500			100 %	2.203.418.500
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.170.178.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.100.000.000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	190.825.000	PENDAPATAN TRANSFER		5 Dokumen	190.825.000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Berita Acara	40.540.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Berita Acara	36.480.000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Berita Acara	91.640.000	PENDAPATAN TRANSFER		3 Berita Acara	91.640.000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Berita Acara	201.957.500	PENDAPATAN TRANSFER		1 Berita Acara	229.007.500
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 Usulan	125.926.000	PENDAPATAN TRANSFER		42 Usulan	125.926.000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	465.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	429.540.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai kebutuhan		100 %	190.689.800			100 %	125.000.000
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		100 Orang	0
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Buku	90.689.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Buku	125.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan		100 %	330.340.000			100 %	390.000.000
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	287.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	330.000.000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	42.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	60.000.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah		100 %	3.405.807.700			100 %	2.991.218.750
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.		100 %	1.085.082.400			100 %	539.971.000
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD)	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					dan RKPD)	dan RKPD)							
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	74.999.900	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	0
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	75.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 Laporan	75.000.000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	75.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	0
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali	3 Dokumen	243.331.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	259.971.000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	62.910.000	PENDAPATAN TRANSFER		8 Laporan	55.000.000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	103.841.500	PENDAPATAN TRANSFER		8 Laporan	0
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	300.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		8 Laporan	150.000.000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen		100 %	1.028.770.000			100 %	1.015.840.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						perencanaan Pemerintah Daerah							
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	5 Dokumen	453.570.000	PENDAPATAN TRANSFER		5 Dokumen	192.780.000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	8 Laporan	146.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		8 Laporan	94.766.500
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	150.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		8 Laporan	117.880.000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	8 Laporan	279.200.000	PENDAPATAN TRANSFER		8 Laporan	210.413.500
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah		100 %	1.291.955.300			100 %	1.435.407.750
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3 Dokumen	129.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	120.000.000
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	50.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	65.000.000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	Kab. Garut, Tarogong Kidul,	3 Laporan	226.716.800	Dana Transfer Umum-Dana		3 Laporan	246.088.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sukagalih			Alokasi Umum			
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3 Laporan	273.855.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	544.319.050
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Dokumen	127.158.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	110.000.000
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Laporan	50.414.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	65.000.000
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Laporan	137.597.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	165.000.000
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Laporan	296.390.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	120.000.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.500.000.000				1.565.000.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti		85 %	1.500.000.000			85 %	1.565.000.000
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan		100 %	200.000.000			100 %	200.000.000
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan		85 %	550.000.000			85 %	220.000.000
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan		85 %	300.000.000			85 %	550.000.000
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang implementatif		85 %	450.000.000			85 %	595.000.000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	275.000.000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100.000.000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	110.000.000
TOTAL									19.194.510.841				18.704.070.797

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Garut adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Bappeda Kabupaten Garut.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Tahun 2023, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan dan pertimbangan antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang dijabarkan dalam sebanyak 5 (lima) tujuan dan sebanyak 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah. Secara umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja makro, 11 (sebelas) indikator tujuan dan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran pembangunan daerah. Secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam mendukung pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Nilai Evaluasi SAKIP”.
3. Keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan melakukan pendekatan penganggaran berbasis *money-follow program* serta pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
5. Mendorong terselenggaranya inovasi serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal.
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

7. Penggunaan sumber-sumber pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah, antara lain peningkatan pelayanan publik, penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, daya beli masyarakat, dan daya saing daerah termasuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 2 bidang urusan yaitu bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.
2. Jumlah program sebanyak 4 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
3. Jumlah kegiatan sebanyak 18 kegiatan, yang terdiri dari 78 sub kegiatan.
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebesar Rp.19.194.510.841,00,00, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Bappeda Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN								17.694.510.841					17.139.070.797
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11.481.126.841					11.429.433.547
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								135.209.700					79.357.900
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	2 Dokume n	100 %	54.161.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	25.000.000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	2 Dokume n	100 %	6.188.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	2 Dokume n	100 %	6.188.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	5.000.000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	2 Dokume n	100 %	6.188.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	5.000.000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	2 Dokume n	100 %	6.188.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	5.000.000
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	2 Laporan	100 %	20.400.700	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	14.357.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	5 Laporan	100 %	35.896.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	20.000.000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.217.945.782					8.244.520.349
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	60 Orang/ bulan	100 %	8.137.173.182	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	8.191.290.349
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokumen	100 %	5.022.200	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	3.600.000
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokumen	100 %	5.022.200	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	3.360.000
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	6 Laporan	100 %	23.070.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	8.370.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokume n	100 %	3.903.200	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	2.000.000
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	30 Lapora n	100 %	39.838.200	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	33.900.000
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokume n	100 %	3.916.800	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	2.000.000
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								157.394.809					156.607.410
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 Dokum en	100 %	149.267.809	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	149.267.910

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	2 Laporan	100 %	4.619.500	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	4.379.500
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Laporan	100 %	3.507.500	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	2.960.000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								282.769.350					238.625.105
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	100 Paket	100 %	113.236.150	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	99.330.105
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokume n	100 %	39.662.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	39.295.000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	60 Orang	100 %	92.611.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	60 Orang	100 %	37.260.200	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	0
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.152.625.600					890.168.733
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 Paket	100 %	15.755.400	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	25.542.300
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 bulan	100 %	201.228.600	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	216.828.333
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Paket	100 %	191.218.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	190.484.300
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 bulan	100 %	59.005.600	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	67.733.000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Persentase ketersediaan dokumen administrasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokumen	100 %	17.350.800	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan	90 %	10.350.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Undangan yang Disediakan	umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan								Pemerintah Daerah sesuai ketentuan		
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 Laporan	100 %	117.366.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	124.500.000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 Laporan	100 %	400.108.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	224.730.000
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokumen	100 %	37.985.100	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	10.000.000
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokumen	100 %	112.608.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	20.000.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								787.439.150					1.039.512.650
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	3 unit	90 %	412.960.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan	90 %	552.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Disediakan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Pemerintah Daerah sesuai ketentuan		
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Unit	90 %	158.253.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	129.172.200
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	3 Unit	90 %	216.225.600	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	358.340.450
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								320.748.850					346.481.400
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 Laporan	90 %	189.981.600	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	175.000.000
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 Laporan	90 %	21.560.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	26.680.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 Lapora n	90 %	109.207.250	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	144.801.400
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								426.993.600					434.160.000
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai dengan kebutuhan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Unit	90 %	41.735.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	20.000.000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai dengan kebutuhan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	18 Unit	90 %	47.055.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	114.160.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai dengan kebutuhan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	3 unit	90 %	338.203.600	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	90 %	300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								2.807.576.300					2.718.418.500
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								2.286.546.500					2.203.418.500
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokume n	100 %	1.170.178.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	1.100.000.000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Persentase proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokume n	100 %	190.825.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	190.825.000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	100 %	40.540.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	36.480.000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Berita Acara	100 %	91.640.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	91.640.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	100 %	201.957.500	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	229.007.500
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Persentase proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	42 Usulan	100 %	125.926.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	125.926.000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD /RPJMD/RKPD)	Persentase proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokume n	100 %	465.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	429.540.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								190.689.800					125.000.000
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Oran g	100 %	100.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Persentase hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Buku	100 %	90.689.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %	125.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								330.340.000					390.000.000
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase hasil rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	287.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembanguna n daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	330.000.000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase hasil rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	42.590.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembanguna n daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	60.000.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								3.405.807.700					2.991.218.750
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								1.085.082.400					539.971.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	150.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	0
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	74.999.900	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	75.000.000	Pendapat an Transfer Pemerint ah Pusat		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	75.000.000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	75.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	3 Dokume n	100 %	243.331.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	259.971.000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	100 %	62.910.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	55.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	100 %	103.841.500	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n dan Kemasyarakat an serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	0
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	100 %	300.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n dan Kemasyarakat an serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	150.000.000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								1.028.770.000					1.015.840.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	5 Dokumen	100 %	453.570.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	192.780.000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	8 Laporan	100 %	146.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	94.766.500
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	100 %	150.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap	100 %	117.880.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Pemerintah Daerah										dokumen perencanaan Pemerintah Daerah		
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	8 Laporan	100 %	279.200.000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	210.413.500
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								1.291.955.300					1.435.407.750
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	3 Dokumen	100 %	129.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	120.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	50.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	65.000.000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	3 Laporan	100 %	226.716.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	246.088.700
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	3 Laporan	100 %	273.855.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan	100 %	544.319.050

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah		prioritas pembangunan Daerah								Pengembang an Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah		
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Dokume n	100 %	127.158.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	110.000.000
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Laporan	100 %	50.414.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	65.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
											Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Laporan	100 %	137.597.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	165.000.000
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap prioritas pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Laporan	100 %	296.390.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	100 %	120.000.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								1.500.000.000						1.565.000.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								1.500.000.000						1.565.000.000
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								200.000.000						200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Laporan	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	85 %	200.000.000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								550.000.000					220.000.000
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	85 %	1 Dokume n	100 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembang an yang ditindaklanjut i	85 %	110.000.000
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	85 %	1 Dokume n	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembang an yang ditindaklanjut i	85 %	110.000.000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								300.000.000					550.000.000
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokume n	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 %	110.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 %	110.000.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								450.000.000					595.000.000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	85 %	1 Dokumen	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	85 %	275.000.000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	85 %	100.000.000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	85 %	1 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	85 %	110.000.000
					TOTAL								19.194.510.841					18.704.070.797

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN